



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAM FAUZI
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 203651

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 693.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/29 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/65 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah Seluas 124 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 93.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 297.500.000

1. MOTOR, YAMAHA FAZZIO NEO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000
2. MOBIL, MITSUBISHI MINIBUS XPANDER Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 258.450.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 126.119.433

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.375.069.433

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.375.069.433

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDRI KURNIAWAN

2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN

3. NHK : 1000260

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	38.085.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	92.862.271
F. HARTA LAINNYA	Rp.	48.757.481
Sub Total	Rp.	179.704.752

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 179.704.752

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.